

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Keputusan masyarakat Inggris memilih keluar dari Uni Eropa pada referendum tanggal 23 Juni 2016 lalu merupakan sebuah keputusan yang bersejarah dalam riwayat organisasi supranasional tersebut. Pasalnya, belum pernah tercatat ada satu negara pun yang keluar dari Uni Eropa. Inggris secara otomatis adalah negara pertama yang memilih untuk mandiri dari belenggu Uni Eropa setelah 40 tahun lebih menjadi anggota. Keputusan yang didapat melalui jalur referendum ini merupakan pilihan bulat karena ditentukan oleh masyarakat Inggris sendiri dan merupakan puncak gunung es dari berbagai perdebatan, keluhan, dan ketidaksukaan terhadap Uni Eropa sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu.

Fakta menunjukkan bahwa keanggotaan Inggris di Uni Eropa selalu dipertanyakan oleh masyarakat sebelum, sesudah, dan selama Inggris bergabung. Keanggotaan Inggris di Uni Eropa selalu menerima respon yang fluktuatif dari masyarakatnya bahkan hingga detik detik menjelang referendum tahun 2016. Hal ini merupakan sebuah manifestasi dari sebuah paradigma *euro scepticism* yang membingkai pandangan masyarakat Inggris. *Euro scepticism* atau keraguan terhadap organisasi regional Uni Eropa merupakan sebuah teori yang menolak integrasi Uni Eropa dalam spektrum politik baik dari segi penolakan terhadap kebijakan-kebijakan Uni Eropa maupun ide integrasi yang dianggap mengancam kedaulatan negara. Hal ini menjadi basis bagaimana masyarakat Inggris, seperti

yang sudah diketahui secara luas, dikenal sebagai masyarakat yang paling tidak menyukai gagasan integrasi dibandingkan dengan masyarakat di negara-negara anggota Uni Eropa lainnya.

Pandangan yang *eurosceptic* ini juga dicerminkan melalui sepak terjang keanggotaan Inggris di Uni Eropa yang dianggap tidak berkomitmen secara penuh. Hal ini dapat dilihat melalui banyaknya kebijakan Uni Eropa yang disikapi secara dingin oleh Inggris. Adanya tuntutan untuk menurunkan jumlah sumbangan Inggris ke Uni Eropa secara permanen, rekor sebagai negara yang paling banyak mengambil opsi *opt out*, serta veto kontroversial Cameron terkait dengan krisis zona euro.

Munculnya wacana referendum sendiri merupakan sebuah efek bola salju dari gerakan *eurosceptic* yang tidak terbendung lagi. Dalam beberapa dekade terakhir, kesuksesan partai beraliran *eurosceptic* Inggris yaitu UKIP (*United Kingdom Independence Party*) semakin menanjak hingga memperoleh kursi di Parlemen Eropa. Selain itu, argumen kaum *eurosceptic* semakin menguat terkait dengan perkembangan Uni Eropa beberapa tahun belakangan ini yang disibukkan oleh berbagai problematika yang melingkupi organisasi tersebut. Momen ini menjadi pemicu yang menyebabkan David Cameron mengeluarkan senjata terakhirnya demi meredam politik internal yang cukup panas pada saat itu: keputusan untuk mengadakan referendum keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Hasil referendum memperlihatkan bahwa 51.9% masyarakat memilih untuk keluar berbanding 48.1% yang memilih untuk tetap berada dalam skema Uni Eropa.

Pilihan untuk berpisah dari Uni Eropa merupakan manifestasi dari anggapan masyarakat bahwa nilai-nilai dan prinsip kerjasama di Uni Eropa berlawanan dengan nilai-nilai dan identitas nasional Inggris. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa keanggotaan negara mereka dalam Uni Eropa tidak lagi bermanfaat. Penyebab masyarakat memilih untuk keluar dapat dikerucutkan menjadi tiga faktor:

Pertama, kebijakan Uni Eropa terkait dengan regulasi imigran dianggap mengancam identitas nasional Inggris. Masyarakat Inggris menganggap bahwa kebijakan kebebasan pergerakan manusia yang selama ini dibanggakan oleh Uni Eropa menjadi sumber dari problematika ekonomi dan sosial yang di Inggris. Banyaknya imigran yang berasal dari negara-negara Uni Eropa menyebabkan kekhawatiran atas komposisi masyarakat yang multikultural dan mengancam kesatuan budaya Inggris.

Kedua, Uni Eropa dianggap tidak lagi memberikan kemakmuran ekonomi pada Inggris. Tujuan Uni Eropa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara anggota dianggap sudah tidak relevan dan bahkan merugikan kepentingan nasional Inggris. Berbagai kebijakan Uni Eropa dinilai bertentangan dengan identitas dan kepercayaan masyarakat Inggris. Pendukung pro *Brexit* memiliki sentimen tersendiri terhadap anggaran tahunan untuk Uni Eropa yang dianggap harus dialokasikan pada sektor domestik. Krisis hutang di zona euro yang hingga saat ini belum pulih semakin menyulut ketidaksukaan masyarakat karena negara mereka harus berkontribusi memberikan *bailout* pada negara-negara yang terlilit hutang. Persepsi ini berasal dari stigma negatif terhadap awal kemunculan mata uang tunggal euro yang tidak diadopsi oleh Inggris. Berdasarkan hasil survei, masyarakat

Inggris tidak pernah sekalipun memiliki opini pro terhadap implementasi mata uang euro yang berdampak pada minimnya dukungan terhadap kebijakan ekonomi Uni Eropa secara keseluruhan.

Ketiga, hukum Uni Eropa dianggap menurunkan supremasi hukum domestik Inggris yang selama ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat. Berbagai aturan hukum Uni Eropa yang dari tahun ke tahun selalu bertambah dan harus diimplementasikan oleh Inggris memunculkan perdebatan yang tidak terkait dengan status Inggris sebagai negara yang berdaulat. Mayoritas masyarakat Inggris berpendapat bahwa keanggotaan di Uni Eropa melemahkan kebebasan negara Inggris dalam menentukan hukum sendiri. Hal ini berakar pada rasa superior yang dimiliki oleh masyarakat Inggris terhadap hukum domestiknya yakni kebanggaan terhadap sistem hukum dan kedaulatan parlemen Inggris.